

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG
DALAM RANGKA PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

RISKA KESUMA PUTRI

NPM :1703100031

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERNYATAAN



Dengan ini saya, RISK A KESUMA PUTRI, NPM 1703100031, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2021

Yang menyatakan



RISKA KESUMA PUTRI

1703100031

BERITA ACARA PENGESAHAN

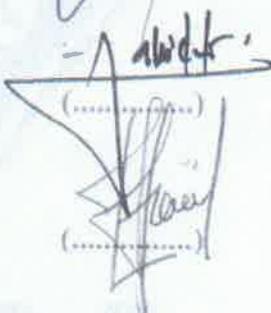
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian/Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RISKA KESUMA PUTRI**
NPM : 1703100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jumat, 24 September 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP** 

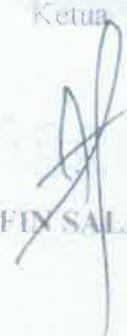
PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP** 

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI, M.L.KOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **RISKA KESUMA PUTRI**
NPM : 1703100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang

Medan, September 2021

PEMBIMBING



DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

**Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Terhadap Pembinaan
Kemasyarakatan Di Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
Riska Kesuma Putri
1703100031**

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di kampung kesehatan dalam pembinaan kemasyarakatan terhadap penyaluran dana alokasi desa kesehatan aceh tamiang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penyaluran dana kampung terhadap pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan aceh tamiang untuk . Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif , yaitu metode yang digunakan untuk suatu fenomenal dilapangan dan diketahui bahwa efektivitas penyaluran dana kampung terhadap pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang sudah efektif namun dalam pembuatan surat menyurat di kampung kesehatan sangat sulit dan pelayanan kurang memuaskan dan menghambat semua proses yang dilakukan terhadap apapun itu dan dalam menyalurkan dana bantuan sangat kurang efektif . Apalagi dimasa sekarang semakin terhambatnya dana kampung yang masuk dan masyarakat sekitar dalam pelayanan didalam kampung kesehatan sangat tidak baik tetapi warga masyarakat dalam membuat surat menyurat yaitu , surat pindah , akte kelahiran dan surat yang lainnya dalam pelayanan yang cukup lama prosesnya. Focus penelitian ini pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Dan yang kedua ini adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key informan dan informasi .hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Kesehatan sudah sesuai dengan kepentingan umum yang berbentuk pembangunan yang nyata seperti, infrastruktur jalan, kemalangan, faktor penghambat adalah pihak pemerintah desa masih kurang SDM nya dan pemahaman tentang perencanaan program. Faktor pendukungnya masih tinggi partisipasi masyarakat desa secara nyata dan keingintahuan tentang kemajuan Desa Kesehatan

Indikator- indikator Penyaluran dana alokasi dikatakan efektif :

1. Karena adanya transparansi dana alokasi desa
2. Sudah efektif dalam penyaluran dana desa kesehatan
3. Peran masyarakat yang lebih baik
4. Antusias masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Implementasi,

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik . shalawat dan salam senantiasa terucapkan SAW yang mengantarkan dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi publik konstrasi pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan seelsainya skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG”**

Dalam penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan orang disekeliling saya , baik secara moral maupun material . untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada yang istimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang yang paling yang penulis yaitu **Kakek Sulaiman** dan **Ibunda Yuslina** dan kepada keluarga besar saya **Oom** dan **Tante –Tante saya** yang telah mendukung saya membantu penulis baik dari segi moril maupun material . yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa testu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis . Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik . karena doa restu dan

tetesan keringat mu penulis dalam mengapai dan dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran , engaku telah mengantarku ke masa depan yan sebenarnya . dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini saya mohon ya Allah semoga selalu dalam lindungan Aamiiiiin.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Drs Zulfahmi, M.I Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Ananda Mahardika, S.Sos,MSP** selaku ka. Prodi Ilmu Administrasi Publik
5. Bapak **Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada saya sangat baik , motivasi , sangat terarah, motivasi saya dengan sangat baik, sabar mendidik saya selama penulis menyelesaikan skripsinya ini.
6. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara yang telah membrikan pengetahuan yang sangat sabar dan disiplin waktu pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan . Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.

7. Para warga masyarakat kesehatan dan kepala datok kesehatan sangat membantu saya dalam melakukan penelitian disesa kesehatan.
8. Kepada adik kandung penulis **Muhammad Raja** yang selalu memberikan dukungan dan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman –teman terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan yang sangat berarti support sistem sekali terima kasih telah mendukung saya dalam pengerjaan skripsi , **Ayu Sintia Darma , Nazla Irwani , Rimadona , Aqila, Debby ,Nelly , Anita , Sariya , Nove , Bella, Salsa, Sahira , Noni , Fifah , Sisi, Siska, Safira, Wulan Daniah , Rizka, rizki, Dona Melisa** sebenarnya masih banyak lagi maaf saya tidak bisa menyebutkan banyak – banyak terima kasih atas dukungan selama ini dalam menyelesaikan yang sama –sama memperjuangkan jenjang sarjana.
10. Untuk teman- teman seperjuangan **Emil** dan **Iin** yang sama- sama berjuang meraih jenjang sarjana.
11. Untuk **lembaga persma Teropong** terima kasih sudah memberikan saya dukungan selama ini dan banyak pelajaran yang penulis terima dan banyak pengalaman yang saya dapat.
12. Kepada seluruh teman-teman kelas IAP pagi pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terma kasih yang sebesar- besarnya . semoga mendapatkan balasan dari Allah swt serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Efektivitas.....	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	10
2.1.2 Ukuran Efektivitas.....	11
2.2 Alokasi Dana Desa.....	12
2.3 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	13
2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	13
2.3.2 Tujuan Dana Desa.....	13
2.3.3 Manfaat Dana Desa Kesehatan.....	15
2.3.4 Indikator Sistem Informasi Alokasi Dana Desa.....	17

2.3.5 Teori Alokasi Dana Desa.....	18
2.3.6 Indikator Alokasi Dana Desa.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Kerangka konsep.....	40
3.3 Defini Konsep.....	41
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	43
3.5 Key Informan.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
3.9 Ringkasan dan Objek Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN.....	47
1.1 Hasil Penelitian.....	47
1.1.1 Deskriptif Narasumber.....	47
4.1 Hasil Penelitian.....	48
1.1.2 Faktor Pengalaman.....	49
4.1.2 Faktor Pengetahuan.....	50
1.1.3 Faktor Kebutuhan.....	50
1.1.4 Faktor Situasi.....	50
4.2 Alokasi Dana Desa.....	57
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Simpulan.....	73

5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 deskriptif narasumber berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 deskriptif narasumber berdasarkan umur

Tabel 4.1 deskriptif narasumber berdasarkan pekerjaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penyaluran lokasi Dana Desa

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Administrasi Pembangunan

Daftar Lampiran

Lampiran I: Lembar pengesahan

Lampiran II: Berita acara bimbingan skripsi

Lampiran III: SK-I permohonan penetapan judul

Lampiran IV: SK-II Surat penetapan judul skripsi dan pembimbing

Lampiran V:SK-III surat permohonan seminar proposal skripsi

Lampiran VI: SK-IV undangan seminar proposal skripsi

Lampiran VII: SK- V berita acara bimbingan skripsi

Lampiran VIII: surat keterangan penelitian

Lampiran IX: draf wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang masalah

Kepala desa adalah orang yang sangat kita hormati di dalam suatu masyarakat desa ataupun kampung dan juga kepala desa sangat mengayomi masyarakatnya dalam apapun keluhan kesahnya masyarakat. Dan kepala desa / datok itu kalau berhubungan masyarakatnya dengan datok mengenai surat menyurat sangat cepat direspon dan ada juga masyarakat atau warga menunggu lama dalam pembuatan surat menyurat tidak cepat ditanggapi sehingga warga atau masyarakat menunggu dalam penyaluran dana desa juga kurang efisien.

Pelayanan masyarakat merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, harus berdasarkan standar sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Efektivitas yaitu yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan dapat dipandang sebagai tujuan yang telah direncanakan atau dengan kata sasaran tercapai Karena ada proses kegiatan , menurut kurniawan, Mengatakan bahwa kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi dari

pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Administrasi keuangan merupakan suatu upaya peneglolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhungann dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi dimana, bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan pengaturan pertanggung jawaban ,pengawasan yang sedang bertugas dan dapat berjalan baik oleh karena itu sebagai suatu administrsi yang mencangkup semuanya.

Kegelisahan dan kecenderungan yang terjadi di lapangan para masyarakat dalam menindak lanjutkan suatu urusan persoalan soal cara melakukan mengurus surat menyurat agak lama dan lama jug direspon tetapi masyarakat tidak sabar dengan menunggunya setiaptindakan atau persoalan yang diambil kurang baik warga masyarakatnya.

Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh Negara / pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kea rah suatu keadaant lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa , administrasi mempunyai peran penting dalam mewujudkan aparatur Negara yang memiliki kemampuan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil . pasal 4 ayat (1) undang –undang dasar 1945peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai . dan peraturan pemerintah no 15 tahun 1994 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural (lembaran Negara

tahun 1994 nomor 21, tambahan lembaran Negara nomor 3546) keputusan presiden no 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan pelatihan.

Lembaga administrasi Negara selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut ini disebut lembaga pemerintah non- departemen yang berada tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang administrasi Negara dalam penyusunan kebijakan dan program pembnagunan administrasi serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur atur Negara agar berdaya guna dalam pemerintah Indonesia .

Alokasi dana desa merupakan keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa yang , pemerintah pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa . sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana penimbangan keuangan pusat dan dcaerah yang diterima oleh daerah yang diterima oleh daerah / kabupaten desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus , maka intinya, alokasi bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak.

Langkah langkah diberikan ADD (alokasi dana desa) : (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, desa dalam melaksanakan pemerintahan, (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarkatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Tahapan yang digunakan dijalankan oleh ADD (alokasi dana desa): (a) membiayai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa (b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa (c) operasional pemerintahan desa (d) tunjangan dan operasional BPD (e) insentif RT,dan RW,serta (f) untuk memadai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat (1). Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;(2) . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); (3) . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- - 2 - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679); (4) . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 (5). Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).

Aturan untuk pelaksanaan ADD (alokasi dana desa) : (1) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari wilayah dari daerah kabupaten /kota yang dipimpin oleh camat (2) kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan (3) menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dan badan pengelola yang diterima kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan, bahwa “ Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten / kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

yang terjadi dalam ADD (Alokasi Dana Desa) dalam pelaksanaan alokasi dana desa kurang adil dalam membagikan uang masuk desa ke beberapa dusun dan kurang paham antar sesama warga .dan juga BUMDes juga mempererat solidaritas antar sesama masyarakat dan uang itu diputar keunagan desa dan pasti balik lagi ke desa . banjir ,jalan rusak , kecelakaan , pemerintah kurang membantu saat terjadi saudara kita yang terjadi musibah di palestina.

Dalam permasalahan ini kita sebagai masyarakat yang baik dan bijak dalam permasalahan yang terjadi dikampung kita harus lebih teliti lagi dan apalagi tentang keuangan desa dan itu bisa dibuat usaha bagi desa yang sangat dibutuhkan masyarakat menanggapi dalam membantu saudara kita dipalestina seharusnya pemerintah lebih peka lagi terhap musibah terjadi dalam dana tetapi pemerintah tidak peduli dengan semua itu , jalan yang rusak sangat meresahkan warga setempat karena mengganggu perjalanan , kecelakaan yang terjadi didalam suatu masyarakat sebagai kepala desa yang baik ikut membantu mengeluarkan untuk warganya , dalam mengeluarkan dana desa langkah-langkah seperti, pembangunan infrastruktur jalan, SDM, keinginan tentang kemajuan Desa Kesehatan.

Kategorisasi

Efektivitas kerja adalah pencapaian usaha kegiatan sesuai dengan rencana dengan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan dan ketepatan waktu bekerja dalam menyelesaikan tugas.

PERTANYAAN

1. Apakah masih ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan?
2. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Masyarakat Desa Kesehatan Karang Baru Aceh Tamiang?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?
4. Bagaimana tingkat kepercayaan terhadap pembinaan perangkat Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah. ‘‘Bagaimana efektifitas penyaluran dana kampung terhadap pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan?’’

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian penelitian ini untuk mengetahui ‘‘ Bagaimana efektivitas penyaluran dana kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang.

1.4 manfaat penelitian

adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a.) Secara akademis diharapkan dapat memberikan Ilmu dalam memperkaya ilmu penelitian dari sumber bacaan dilingkungan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP) universitas muhammadiyah sumatera utara.
- b.) Untuk tempat penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan dan dapat memberikan pembelajaran yang didapat dalam penelitian.
- c.) Untuk diri sendiri diharapkan dapat meningkatkan dan menjadi wawasan dan memperluas pelajaran yang kita dapat menjadi pembelajaran yang didapat.

1.5 sistematis penulisan

Sistematis penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dari mengkaji penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan adalah pengertian efektivitas, penyaluran dana kampung, pembinaan kemasyarakatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka konsep, kategorisasi, informasi, lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara .

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini kita dapat mengambil kesimpulan hasil dalam penelitian yang kita dapat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Beni (2016:6) Pengertian Efektivitas Adalah, hubungan antara output dan output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi Efektivitas. Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif indicator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektifitas proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2010:143) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut fajar efektifitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan. Menurut Beni (2016:136) dalam kenyataan selama ini kabupaten /kota selalu menargetkan besarnya penerimaan hanya berdasarkan *incremental potentials* yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Dengan demikian , fakta bahwa kabupaten /kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target berjumlah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini

dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian.

2.1.2 Ukuran Efektifitas

Efektivitas pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat jumlah, waktu, sasaran, harga, administrative dan kualitas. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu : (1) produktivitas (2) kemampuan adaptasi kerja (3) kepuasan kerja (4) kemampuan berlaba (5) pencarian sumber daya, selain itu ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Martini dan Lubis (1987:55) : (a) pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (b) pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat jauh internal atau mekanisme organisasi (c) pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Streers (1985: 53) sebagai berikut: (1) pencapaian tujuan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,

diperlukan pertahanan, baik dalam arti pertahanan pencapaian bagian- bagiannya, maupun pertahanan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit (2) integrasi pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi (3) adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.2 Pengertian Administasi Desa

Menurut soenarjo Nurcholis (2011;4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun Karena sama-sama memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan tangga sendiri. Menurut nurcholis (2011: 65) desa administrasi satuan wilayah administrasi , yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dibentuk oleh negara dan dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas administrasi yang diberikan Negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Menurut Santosa (2008: 339) alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Usman (2013:5) manajemen berasal dari bahasa latin,yaitu dari dari asal kata kamus yang berarti tangan agree (melakukan). Kata- kata itu digabung menjadi manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan kebahsa inggris (to manage) dan memlakukan menjadi pengelolaan. Menurut Sastrohadjiwiry (2009:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan.manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Menurut Sintia dwi, (2015) Efektivitas pengelolaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut prespektif ekonomi islam studi pada desaKesehatan Kecamatan Karang Baru. Pengalokasian (ADD) Alokasi Dana Desa upaya meningkatkan pembangunan d

2. 3.2 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Tahun 2014 tentang desa , tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah : (1) mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan (2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa (3) meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan , sosial, , budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial (4) mendorong

pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan local (5) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa (6) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa (7) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggaraan alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, taruna, linmas.

(SDM) Sumber Daya Manusia dalam perangkat desa, Sekarang ini kan masyarakat dan perangkat desa kurang dekat dan mungkin malu untuk meminta bantu kepada perangkat desa dalam surat menyurat padahal itu adalah tugas perangkat desa dalam mengatasi masalah yang ada di dalam suatu masyarakat itu, setelah Kepala Desa yang mengayomi masyarakat saat dalam kesusahan juga perangkat desa harus juga mengikuti aturan yang sudah dibuat dari kepala desa jadi perangkat desa harus juga menjaga keramahan bersama masyarakat Desa Kesehatan Karang Baru. Yang juga dimana masyarakat sangat membutuhkan dukungan apapun itu dalam melakukan sesuatu hal yang sangat penting dan juga

perangkat desa harus siap membantu apa saja yang diperlukan masyarakat dalam melakukan kegiatan dia dalam masyarakat Desa Kesehatan.

2.3.3 Manfaat Dana Desa Kesehatan

Dana desa diprioritaskan untuk pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa , selain dengan pencapaian target RPJMDes dan RKP setiap tahunnya, melalui : (1) dana desa diprioritaskan untuk pemenuhan dasar meliputi : (a) pengembangan pas kesehatan desa dan polindes; (b) pengelolaan dan pembinaan posyandu; (c) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD). (2) dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi : (a) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa ; (b) pembangunan dan pemelihara sarana dan prasarana dan prasarana jalan usaha tani; (c) pembangunan energy baru dan terbarukan; (d) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; (e) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; (f) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; (3) dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan , serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD , seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan , dilaksanakan dan dievaluasi secara

terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif , secara,teknis, dan secara terarah , ekonomis , efisien , efektif, berkeadilan , dan terkendali.

Masyarakat Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa kesehatan karang baru Kabupaten Aceh tamiang 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagaimana. Memuat konsep- konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literaturliteratur yang membahas konsep penelitian. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Sedangkan, menurut Rosmery Elsy (2016:2) definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut Ahmad Yani (2009:428) Definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : “Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini juga merupakan salah satu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Indikator Sistem Informasi alokasi dana desa

Menurut Ahmad Yani (2009:429) yang terkait pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah meliputi: 1) Keamanan Data; 2) Ketepatan Waktu; 3) Ketelitian; 4) Variasi Laporan atau Output;

1.Keamanan

data Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

2.Ketepatan waktu Ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.

3. Ketelitian

Ketelitian adalah kesesuaian diantara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.

4. Variasi Laporan atau Output

Laporan atau Output adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki.

5. Relevan

Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

2.3.5 Teori Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011:155) mendefinisikan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : Dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa. dapat dikatakan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

2.3.6 Indikator Alokasi Dana Desa

Menurut Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) yang terkait pada alokasi dana desa meliputi: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; 3) Penatausahaan;

Adapun penjelasan indikator Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Daerah Berbasis AkruaI mengemukakan bahwa Kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Kualitas laporan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut

Menurut Mardiasmo (2009:32) mengungkapkan Untuk: dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang andal, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daera

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rohcmansjah, (2010:67) mengungkapkan: Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik.

hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis web di kabupaten Pacitan dinyatakan diterima. Hal ini dapat diperoleh dari hasil angket dari 40 responden berdasarkan variabel-variabel UTAUT menyimpulkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan di terapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di setiap masing-masing instansi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan. Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Lia, Andi & Husin (2016) tentang Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi 20 Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil kajiannya menunjukkan kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Artinya semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Uraian teoritis adalah sebuah narasi lengkap dan sempurna tentang variable yang diangkat dalam judul skripsidan konsep yang menyertai variable tersebut. sebuah uraian teoritis bukanlah deskripsi lokasi penelitian. Uraian teoritis tidak boleh memuat geografi, demografi, struktur organisasi.

Uraian teoritis adalah narasi lengkap dan sempurna tentang variabel yang diangkat dalam judul skripsi dan konsep yang menyertai variabel tersebut.

Dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Sebelum mengajukan hipotesis, peneliti wajib mengkaji teori-teori dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, yang dipaparkan dalam Bab II (Uraian Teoritis) Tinjauan pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek (variabel) yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis yang telah diajukan dalam Bab I. Untuk dapat memberikan deskripsi teoretis terhadap variabel yang diteliti, maka diperlukan adanya tinjauan teori yang mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang diajukan menuntut peneliti untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Pembahasan terhadap hasil penelitian tidak dilakukan secara terpisah dalam satu sub-bab tersendiri.

Uraian Teoritis juga bisa merupakan kajian teori, yang merupakan paparan teori-teori atau konsep-konsep yang menjadi dasar pengetahuan yang diperlukan dalam analisis dan pembahasan penelitian. Definisi atau teorema yang diambil dari referensi atau buku harus mencantumkan sumbernya.

Kerangka konsep adalah alur berfikir yang sistematis yang berisi kaitan satu konsep. Kerangka konsep merupakan alur pemikiran guna memecahkan masalah yang diteliti tersebut. Jadi, kerangka pemikiran adalah model, cara, atau langkah-

langkah yang dipakai untuk menggarap dan memecahkan masalah yang hendak diteliti. berfungsi untuk membantu memudahkan peneliti melakukan penelitiannya.

Alokasi Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan

Pemerintahan Desa Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, h.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Perencanaan ADD Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa Wonorejo, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Wonorejo dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat.

Penggunaan ADD Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Wonorejo yaitu sejumlah Rp. 102.417.000,-. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasajo (2003, h.12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada pro-ses pemberian atau pengalihan sebagian ke-kuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa wonorejo belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes. Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatankegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai

dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak. Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005, h.55) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja (2004, h.169) yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya peningkatan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Menanggapi pemberdayaan masyarakat tersebut, desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Fenomena dilapangan menunjukkan, masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang politik dimana tidak adanya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada desa Wonorejo. Menurut Prasjojo (2003, h.13) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang

politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiono (2005) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi

Menurut Krik dan Miller tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahnnya. penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai (Effendi dalam Mohammad, 2003), sedangkan menurut Sugiyono (2007) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa

menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuensi. (Arikunto, Suharsimi, Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai (Effendi dalam Mohammad, 2003), sedangkan menurut Sugiyono (2007) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan

penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan.

Pemerintah Desa Bukumatiti yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa. b. Pemerintah Desa Bukumatiti yang meliputi pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD). c. Masyarakat Desa Bukumatiti (Pengguna Jasa), yang dalam hal ini diambil dari para kepala keluarga. 2) Data Sekunder, yaitu data yang diharapkan melengkapi dari hasil penelitian atau objek yang di wawancarai. Dalam hal ini meliputi data hasil kajian dokumentasi kegiatan, program kerja dan literature lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data primer, ini dilakukan dengan cara : a. Metode Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan. b. Metode Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan yang dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

Adapun bentuk pengumpulan data sekunder, yang dilakukan adalah : a. Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya. b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan. d. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa³ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa. c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Berhubung dengan hal diatas maka yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni salah satunya transparansi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dari pihak pemerintah.

masyarakat guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung. Dengan adanya informasi yang secara terbuka maka memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dapat memberikan informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) salah faktor yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Dalam artian bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Tujuan dari prinsip akuntabilitas adalah menjaga ketidakjelasan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa demikian karena untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada kelompok sasaran yakni masyarakat.

prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Arti dari prinsip partisipasi adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk

kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di terima. Tujuan dari partisipatif adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian juga dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan dan terlibat aktif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Serta bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi pelaksanaan program sebagai realisasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima. Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Untuk mengetahuinya.

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa harus memperhatikan prinsip transparansi. Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) .Karena realitas yang terjadi pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang orientasinya untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan.

Dan begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu mempertanggungjawabkan mengenai dengan realisasi program dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan

hasil penelitian dilapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat guna mengetahui tentang keluhan atau kebutuhan yang akan di buat dalam bentuk program dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun kenyataan dilapangan bahwa program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaran otonomi desa.

Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu

adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundangundangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Sedangkan stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BPD peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam penyusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna pemberdayaan lingkungan sesungguhnya yaitu upaya untuk perawatan dan pelestarian lingkungan. Sedangkan wujud dari pemberdayaan manusia berupa biaya operasional untuk pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan pemberdayaan wanita melalui PKK.

Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Permusyawaratan

Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu melaksanakan program tersebut secara tertib, efektif, efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrative. Kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan pengelolaan alokasi dana desa mempunyai beberapa peranan yang meliputi: (a) mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, (b) membentuk tim pelaksana tingkat desa, (c) membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan tokoh masyarakat, dan (d) mendampingi bendahara desa pada saat pencairan alokasi dana desa.

ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa. Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung BPD juga turut berperan dalam pengelolaan alokasi dana desa karena BPD mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan bersama dengan pemerintah desa bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Peranan BPD

lainnya yaitu turut berkontribusi pada tahap perencanaan cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Padahal tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundangundangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya.

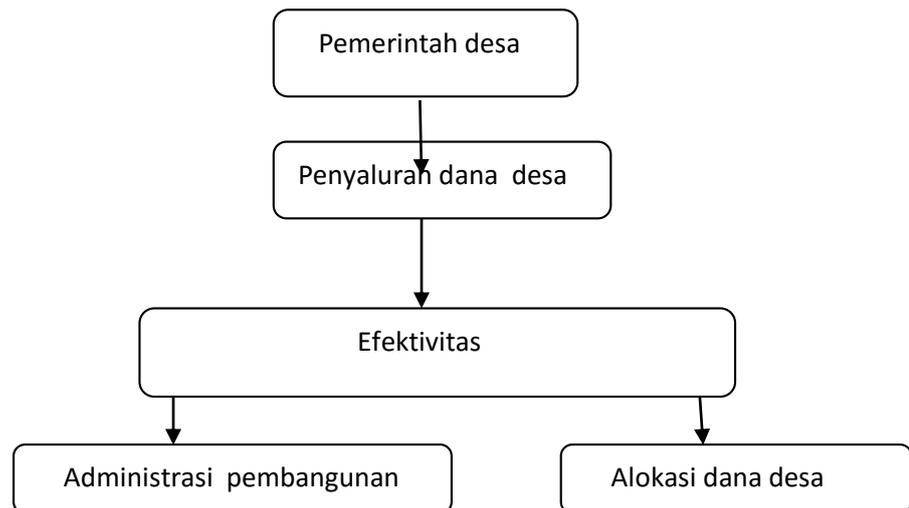
desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan, Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut

akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

3.2 Kerangka konsep

Kerangka konsep merupakan satu kerangka pikir yang di jadikan landasan dalam menggambarkan konsep penelitian. Adapun konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3.1 kerangka konsep



3.3 Defini konsep

Definisi konsep adalah suatu gambaran untuk menjelaskan kejadian, keadaan kelompok atau individu berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian sebagai konsep berikut:

1. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber

daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Istilah desa hanya dika.

2. Penyaluran dana desa adalah sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musrembang desa Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.
3. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan

prosedur dari organisasi. ... Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

4. Administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan suatu Negara bangsa untuk bertumbuh , berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.
5. Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

3.4 kategorisasi penelitian

Kategorisasi adalah proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dan dimengerti kategorisasi meyaratkan bahwa benda termaori suk dalam kategori untuk tujuan antara subjek dan objek pengetahuan.

Maka kategorisasi dlam penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.2 kategorisasi

No.	Konsep	Kategorisasi
1.pemerintah desa	Alokasi dana	-Partisipasi masyarakat - transparansi -keberagaman

2.penyaluran dana desa	Kampung kesehatan	-Solidarit -Kekeluargaan

3.5 key informan (ADD) Alokasi Dana Desa

dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induk Menurut sugiyono yaitu menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

3.6 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini ini, teknik pengumpulan data yang

Digunakan penulis sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan Data Primer:
 - a. Metode wawancara (Interview), yaitu suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan terhadap dua atau lebih dengan mekanisme tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang di sampaikan oleh informan.

b.,Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati, mengkaji. Dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data primer :

Teknik pengumpulan data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti(studi kepustakaan).

3.7 **Teknik Analisis Data** Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono.

(2014 : 91) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.8 **waktu dan lokasi penelitian**

lokasi penelitian berada di desa kesehatan kecamatan karang baru, kabupaten aceh tamiang. Dengan jumlah penduduk 111603 jiwa. Dengan luas wilayah 114 ha. Mayoritas penduduk desa kesehatan adalah sebagai petani sawit, perdangan,dan hal ini yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat desa kesehatan.

3.9 **Ringkasan dan objek Penelitian**

Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang

dibagikan secara proporsional. Itulah dana desa yang k

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari penelitian dilapangan atau dikenal dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang dipeoleh dengan cara Tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambara jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di desa mengenai alokasi dana desa (ADD) dengan Efektivitas penyaluran dana kampung dalam rangka pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang.

Untuk mendukung peolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait deangan tingkat jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1.1.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Kelamin

Berdasarkan data yang dipeoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan penelitian pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut.

4.1 HASIL PENELITIAN

Pengertian penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa definisi penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. penelitian harus dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang sifatnya logis dan teratur sesuai dengan sistem yang telah diatur sehingga dapat menjelaskan rangkaian sebab-akibat suatu objek penelitian. penelitian harus berdasarkan sumber pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan indera manusia. Dengan begitu, metode tersebut juga dapat diamati oleh orang lain. adalah memperoleh narasumber dari bapak datok penghulu, perangkat desa, masyarakat, ibu pkk

4.1.1 Wawancara hasil

Hasil wawancara adalah Laporan hasil wawancara menjadi salah satu hal penting dalam laporan yang perlu disusun secara sistematis dan sesuai kaidah yang ada. Untuk dapat menyusunnya dengan baik, berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai definisi, fungsi dan cara membuat laporan hasil wawancara yang baik untuk Anda ketahui.

Untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, biasanya kita melakukan serangkaian wawancara pada narasumber terpercaya. wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab antara pengumpul informasi dengan responden. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita perlu menyusun laporan hasil wawancara untuk mempermudah pembaca memahami isi wawancara. laporan hasil wawancara perlu disusun untuk mencatat informasi yang diperoleh dari suatu wawancara. Setelah memahami bagaimana tata bahasa yang perlu digunakan dalam laporan hasil wawancara, kita juga perlu mengetahui bagaimana susunan laporan hasil wawancara yang benar.

Hasil wawancara dari penelitian ini disusun berdasarkan klarifikasi jawaban narasumber tentang pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan faktor-faktor terbentuknya persepsi yaitu ada empat: pertama faktor pengalaman, pengetahuan kedua faktor pengalaman ketiga faktor kebutuhan dan keempat faktor situasi. Hasil dari wawancara tersebut disajikan agar mudah menganalisisnya sebagaimana yang terlihat pendapat masyarakat dalam saya mewawancarai tentang desa kesehatan

4.1.2 faktor pengalaman

Dalam saya melakukan observasi, wawancara dan penelitian yang saya dapatkan sangat banyak pengalaman yang baru bagi saya dan sangat saya butuhkan pengalaman itu dalam saya meneliti didesa kesehatan masyarakat yang baik akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang berkenan dalam melakukan hal itu seperti,

gotong royong mereka mau gerak karena ada uang bukan karena inisiatif mereka sendiri.

4.1.2 faktor pengetahuan

Dalam saya melakukan penelitian di desa kesehatan banyak pengetahuan yang saya dapatkan dan membuat saya banyak mendapatkan pengetahuan yang baru dan baik sekali bagi saya tentang kekeluargaan, solidaritas, kekompakan, kebergaman dan banyak manfaat yang saya dapatkan dan bisa saya buat dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat berbondong-bondong dengan antusias yang besar.

4.1.3 faktor kebutuhan

Dalam saya melakukan penelitian di desa kesehatan saya sangat butuh dengan masyarakat yang membantu saya selama saya penelitian di desa kesehatan apa pun yang saya butuhkan dalam saya melakukan penelitian di desa itu sangat membantu saya sekali dalam segi apapun itu benar-benar membantu saya tidak ada yang mempersulit saya dalam melakukan penelitian di desa kesehatan.

4.1.4 faktor situasi

Dalam melakukan penelitian situasi dan kondisi sangat aman dan tidak ada kesulitan malahan sangat membantu saya sekali dalam meneliti di desa dan sangat membantu saya dalam situasi apa pun di desa itu perangkat desa yang sangat baik dan ramah, membuat saya tidak enggan lagi dengan semua yang mereka buat dan saya juga ikut segala kegiatan yang desa itu buat dan ikut adil dalam hal apa pun yang sangat membantu saya dalam meneliti di masyarakat sangat membantu saya sekali agar mempermudah saya dalam melakukan beberapa kegiatan yang tidak

merugikan saya dalam hal apa pun yang menyangkut tentang masyarakat desa kesehatan.yaitu ada pun meliputi:

1. kekeluargaan
2. keberagaman
3. solidaritas
4. gotong royong
5. kemasyarakatan

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam
Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa
Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang

Nama Peneliti : Riska Kesuma Putri

NPM : 1703100031

Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik UMSU

Materi Penelitian : Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam
Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa
Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang

Kategorisasi :

2. Bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuskan Apakah masih ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan?
3. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Masyarakat Desa Kesehatan Karang Baru Aceh Tamiang?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?
5. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?

Pertanyaan Wawancara berdasarkan Kategorisasi :

1. Bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuskan , Apakah masih ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan?
 - a. Masyarakat
 - b. kepala Desa
 - c. Peraturan Desa
 - d. Aparatur Desa

2. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Masyarakat Desa Kesehatan Karang Baru Aceh Tamiang?
 - a. Mengayomi Masyarakat
 - b. Kepedulian Masyarakat
 - c. Kedisiplinan
 - d. Peraturan Desa

3. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?
 - a. Lebih dekat kepada masyarakat
 - b. Peran Pemerintah
 - c. Kewenangan masyarakat
 - d. Kepentingan Bersama

4 . Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?

- a. Berwewenang tinggi
- b. Aparatur Desa
- c. BUMdes
- d. Masyarakat

1.4.5 Hasil wawancara pedoman wawancara

Pertanyaan:

1. Bagaimana upak mencapai sasaran yang dirumuskan, Apakah masih ada dana bantuan desa kesehatan selain dana desa yang dialokasikan?

Jawaban:

Kita jemput segala upaya bantuan dana yang tidak tersedia dana-dana dari APBK datang kekampung kita ini banyak dana yang kita jemput kita bawa kemari untuk masyarakat, jadi upaya pak datok sangat membuat jaringan diluar supaya kampung kita ini lebih maju dan semua untuk masyarakat tidak lepas dari anggaran desa kesehatan

2. Usaha apasajakah yang kepala desa lakukan untuk meningkatkan SDM (sumber daya masyarakat) masyarakat desa kesehatan karang baru aceh tamiang?

Jawaban:

Sumber daya masyarakatnya agar lebih baik lagi dan tidak ketinggalan jauh dari manapun kekompakan dan antusias warga masyarakat dalam melakukan

halapa pun yang membuat masyarakat supaya banyak kegiatan yang ada di desa kesehatan dan menghandirkan apa pun yang membuat desa lebih maju dan upaya yang sangat besar adalah untuk semuanya kepentingan seluruh masyarakat dan tanggung jawab yang sangat besar dalam kepentingan masyarakatnya.

3. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan desa kepada masyarakat desa kesehatan?

Jawaban:

Kalau kami mau menjalankan program kanun, ataupun resam kampung membuat aturan resam kampung jadi itu kita lihat dulu di lapnagn seperti apa yang kita buat itu harus sesuai dengan masyarakat jadi kita itu tidak asal-buat resam kampung itu harus kesepakatan bersama dan bermusyawarah bersama tidak mengambil keputusan sendiri biar pun saya datok penghulu di desa kesehatan harus dengan kesepakatan bersama.

4. Tugas dan fungsi ibuk pkk di desa kesehatan?

Jawaban:

1.1 IBUK PKK

Ibuk pkk itu kan adalah istri datok dan ibuk pkk itu sendiri pun setiap pemilihan datok yang terpilih ibuk pkk selalu ada dan mengikuti beberapa kegiatan, dan ibuk pkk sendiri selain istri datok ada juga masyarakat desa kesehatan yang menjadi ibuk pkk , agar ibuk pkk ini bisa berjalan dengan baik contohnya: menyulam kain,

menjahit dan kegiatan itu setiap satu bulan sekali dan sangat aktif membuat desa kesehatan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disampaikan bahwa dalam hal ketetapan datok pengulu desa kesehatan yang banyak respon dari masyarakat dalam melakukan kegiatan apa pun itu dalam melakukan hal- hal yang menyangkut tentang desa kebijakan yang dibuat sangat dibantu dan ketimbang datok penghulu yang sebelumnya pelayana yang sangat adil, kebijakan apa pun yang di buat di desa kesehatan.

Pelayanan masyarakat sangat berpengaruh dalam kinerja perangkat desa yang melayani keluh kesah masyarakatnya yang terjadi di desa kesehatan pelayanan masyarakat yang dibuat agar masyarakat dalam mengurus surat menyurat cepat ditanggapi dan salahnya dalam masyarakat tidak mau menanggapi apa pun yang terjadi aturan yang dibuat dan meliputi ap pun yang bersangkutan pautan dengan kegiatan yang berlaku dan dalam alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang sangat berpengaruh penting bagi kemajuan desa kesehatan

Alokasi dana desa yang apa pun masuk kedalam desa kesehatan berpengaruh penting dan juga himbauan kepada masyarakat dalam beberapa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat belanja honorarium PKPKK DAN PPKK keperluan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ibuk pkk dan kegiatan yang yang dialokasikan di desa kesehatan kegiatan yang sudah terjadi 10 muharam banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan dsan perlombaan yang telah terselenggarakan, pembagian untuk anak yatim dan sangat dibutuhkan warga yang membutuhkan dan juga sangat berpengaruh sekali dalam nhal itu yang mejdi patokanyang sangat besar

dalam kemajuan desa kesehatan yang dalam melakukan surat menyurat tidak dalam penyelenggaraan posyandu (MKn kampung), belanja barang perlengkapan

4.2 Alokasi dana desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.

Partisipasi dalam pelayanan dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh para kepala dusun masing-masing warganya membuat yang terbaik dan apa pun keluhan yang mereka laporkan kepada kepala dusun yang mejadi baik dan kekompakan yang ditanamkan dan saling membantu dalam kegiatan berlangsung namun hal tersebut juga belum bisa meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik atau buruknya dalam turunnya masyarakat dalam melakukan hal- hal yang tidak merugikan masyarakatnya.

Dalam pelayanan masyarakat desa kesehatan dapat disimpulkan efektivitas pelayanan izin pelayanan masyarakat penertiban dalam pembangunan desa jalan, transparansi, baksos desa yang dilakukan sangat rutin yang kepentingan pada organisasi yang berada di desa kesehatan pelayanan masyarakat masih bahwa kurang dilakukan.

Kinerja perangkat desa yang menjadi salah satu kegiatan menjadi peran penting , Kinerja Aparat Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak syahmirza wani keplor Bandar (kepala dusun Bandar) pada hari rabu 25 agustus 2021 pukul 16:33 dengan bapak mirza selama menjabat sebagai kepala dusun banyak informasi yang didapatkan juga mengadakan beberapa pelatihan untuk kepentingan masyarakat desa kesehatan mengayomi masyarakat sekitar kabupaten aceh tamiang.

Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam kerangka membangun pembaharuan bagi desa itu sendiri. Salah satu factor utama dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak kepada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Membangun partisipatif efektif masyarakat sudah tentu dimiliki suatu desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Populasi yang menjadi

perhatian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Bo'e dan seluruh masyarakat Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

4.1 Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang

Menurut Ravianto "2014:11" Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Sehingga dari definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan publik adalah hubungan tujuan dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan maka organisasi maupun mutunya maka dapatkan hubungan output atau pun input yang berlangsung dengan baik dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran dana kampung dalam rangka pembinaan kemasyarakatan di desa kesehatan kabupaten aceh tamiang yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya kurang mau bergotong royong yang membuat antusias masyarakat enggan dengan itu semua apalagi dengan perbandingan dengan pak datok penghulu lama dalam memnita tanda tangan sangat sulit pelayanan yang kurang memuaskan.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara.

Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya Kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan.

Partisipasi pelayanan masyarakat terhadap masyarakat desa kesehatan dalam pelayanan perangkat desa kepada masyarakatnya sudah sangat baik dan pak datok sendiri dengan adanya perangkat desa yang sekarang sangat membantu sekali dalam menjalankan pak datok untuk mengayomi masyarakatnya agar tetap kompak dan bekerjasama dengan baik tidak ada satu pun yang membuat marah atau gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah dibuat dalam menjalankan apa pun itu dengan baik dan bijak sana dalam pimpinan masyarakat yang sangat baik dan tidak ada yang dirugikan dengan bekerja sama dengan baik yang mentaati peraturan desa dengan sangat baik.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat

kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya. Sementara dikutip dari penjelasan di buku *Pengembangan Masyarakat* karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.

pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan

sifatnya berkelanjutan. (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain

adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk dan eksploitasi atas yang lemah.

Berdasarkan pada beberapa konsep diatas, maka saya dapat menyimpulkan pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu untuk mendorong (Encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya, bukan membuat masyarakatnya menjadi tergantung pada berbagai program pembangunan yang ada, tetapi yang harus dihasilkan dan dinikmati atas hasil usaha sendiri.

Selain itu upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, dan memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pemberdayaan bukan hanya meliputi individu-individu dalam masyarakat saja, tetapi juga unsur-unsur pranata penduduknya.

Hasil wawancara dengan Ajiba yang berumur 71 tahun pekerjaan ibu rumah tangga sebagai warga masyarakat desa kesehatan. Pak datok penghulu yang sekarang dan sebelumnya banyak sekali perbedaannya yang sekarang ini pak datok penghulu banyak memperhatikan warga masyarakatnya setiap pengaduan cepat ditanggapi, pak datok penghulu yang sebelumnya meminta tanda tangan saja susah lama ditanggapi apa pun permasalahan warga yang dihadapi perubahan yang pak datok penghulu sekarang ada banyak sudah Nampak perubahan misalnya seperti,

pengutipan sampah gratis, ada juga perayaan apa pun tetap diadakan 10 muharam, maulid, pas waktu bulan puasa juga membagi takjil gratis selama bulan puasa berlangsung 28 an enak di pandang sangat membawa perubahan pengaduan kepada pak datok penghulu yang sekarang ini cepat ditanggapi, kebersihan desa selalu di jaga itu sangat mencerminkan pemimpin yang bijaksana dalam mengurus surat-menyurat juga gratis tanpa dipungut biaya sudah ada papan pembertahuan bahwasannya dalam membuat surat-menyurat itu gratis pak datok penghulu yang sekarang dan sebelumnya berapa % yang dulu 40% dan yang sekarang 100% dan pak datok penghulu juga mendapatkan penghargaan sebagai pak datok penghulu terbaik dan disiplin masyarakat desa kesehatan dalam mengikuti kegiatan yang

dibuatikut adil kegiatan apa pun saja masyarakat desa kesehatan ikut serta masyarakat apa yang dikerjakan pak datok penghulu dan para perangkat desa kesehatan.

pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita. Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan. Pun, akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maup Contoh lainnya, mengenai kasus atas ide pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan dengan memberikan wawasan pegenai internet marketer. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan dalam upaya mendistribusikan hasil pertanian masyarakat kepada khalayak umum. Hal ini cenderung penting mengingat pada saat ini globalisasi dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. sekunder dari makna pemberdayaan yang ada.

Definisi konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya sekumpulan orang yang memilih untuk menjadikan dirinya dalam menempuh keadilan dan berdap menjadi secara efektif esensial dan struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional, termasuk didalam bidang politi, ekonomi maupun lainnya. Upaya ini dilakukan dalam mendukung gerakan keadilan sosial bagi masyarakat. Yang bisa dilakukan dengan

membentuk komunitas, organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat perkotaan ataupun di dalam kehidupan masyarakat desa.

Proses yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini dibentuk dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat. Sekunder yakni suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan melalui dialog yang interkatif, antara pihak satu dengan lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan mengali potensi serta kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan kemandiariannya. Langkah ini dilakukan setelah serangkaian dialog serta prosesi arti sosialisasi dilakukan.

Hasil wawancara yang bernama Afriani 44 tahun pekerjaan ibuk rumah tangga sekaligus ibuk pkk warga masyarakat desa kesehatan tugas dan fungsi ibuk pkk utamanya ibuk rumah tangga ada kegiatan masak-masak ada juga pelatihan yang dipanggil tidak semua setelah itu dikembangkan didesa kesehatan ibuk pkk berjumlah 20-30 orang warga biasa pkk , kader posyandu , okh (program keluarga harapan) penerima manfaatnya orang itu lebih maju desa kesehatan banyak perubahan yang sudah dibuat pak datok penghulu yang sekarang ini yang lebih baik lagi

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan

awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berknaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa “empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on” (Ife, 1995). Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam

Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Soemodiningrat, 2002). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Hasil wawancara yang bernama Syaiful Alam beumur 49 tahun jabatan Datok penghulu desa kesehatan selama saya menjabat sebagai bapak datok penghulu desa kesehatan dalam bantuan apa pun itu warga masyarakat desa kesehatan mampu kesmudian masyarakat desa kesehatan sudah lebih maju bisa berkembang sekarang sudah naik status jadi desa maju dapat hadiah dari pemerintah pusat 200.88.000.000 sudah mau memasuki desa mandiri dengan itu desa mandiri dijuluki desa didalamnya terdapat tim penilainya di luar dari perangkat intinya bekerja pelayanan masyarakat secara administrasi bisa maju sejahtera bisa dibantu perangkat desa kesehatan dalam menjalankan tugas apa pun itu sangat membantu pak datok penghulu dan kalo ada perihal dan di musyawarakan bersama dalam perangkat desa, keimaman, lembaga MDSK , termasuk juga masyarakat.

Berperan dalam agar desa kita ini sudah maju dan setelah itu naik desa mandiri kegiatan apa pun pada bulan puasa perangkat desa kesehatan bagi-bagi takjil gratis dan itu tidak hanya masyarakat desa kesehatan saja dan dalam pembagian takjil gratis tidak hanya perangkat desa aja yang membagikannya warga desa

kesehatan juga ikut serta juga dalam pembagian takjil gratis selama 28 hari waktu bulan puasa.

Tahun pertama dan tahun kedua hampir 1 bulan penuh kegiatan bagi- bagi takjil gratis sudah dilaksanakan dan juga menjadi program baru selama pak datok penghulu yang sekarang ini menjabat.

Hasil wawancara upaya sasaran pak datok penghulu kita jemput bantuan apa pun yang sudah keluar tidak mengharapkan dana yang tersedia saja menjemput dana yang lain juga diputar keuangannya untuk masyarakat desa kesehatan pak datok penghulu juga APBK , Provinsi ,sampai ke pusat tidak hanya focus dengan dana ADD saja bawa dana yang lain yang banyak dan dibagikan kemasyarakatan meloby, membuat jaringan tidak lepas dari anggaran dan itu terjadi jika dana itu dari luar kita perdayakan kemasyarakat yang cocok kita buat dikampung ini contohnya ada 4 kegiatan : pembangunan pagar mesjid dipercantik lagi, pembangunan MCK anggaran sebesar 100.90.000.000 , rumah imam , alat pkk dana dari luar dana aspirasi jadi pembangunan untuk dikampung ini untuk kesejahteraan dikampung ini tidak focus dengan dan ADD saja setelah itu kampung kita maju pesat dan berkembang semua dana yang diluar tadi itu kita bawa kemari dan kita bangun kampung ditahun ini yang akan pak datok penghulu laksanakan 4 kegiatan ibuk pkk dan fungsinya istri pak datok penghulu ini harus kita buat kegiatan bisa berjalan bisa bersinergi dengan datoknya menajalankan antara datok dan ibuk pkk banyak membuat merajut, menjahit, menyulam pita ada juga pelatihan tidak boleh dipisahkan dan dia masuk kesatuan sesuai dengan aturan itu SDM upaya apa saja desa kesehatan ada undangan ada juga pelatihan- pelatihan selama 1 bulan sekali

nya menghadiri kita tetap hadir untuk meningkatkan baik untuk kemajuan kampung desa kesehatan.

pembinaan adalah suatu proses, tindakan hasil atau suatu pernyataan menjadi lebih baik". Dalam hal ini menunjukkan adanya kemauan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial. Pembinaan adalah sebuah konsep populer dalam sistem organisasi birokrasi di Indonesia. Sering didengar konsep aparatur negara, pembinaan pegawai negeri sipil, pembinaan karir, pembinaan masyarakat terasing, pembinaan remaja, pembinaan masyarakat desa dan sebagainya. Konsep ini dianggap penting sebab sangat menentukan kesinambungan tujuan pembangunan nasional dan stabilitas nasional. Salah satu definisi, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut untuk dalam rangka menumbuhkan motivasi sosial. Kegiatan ini dilakukan baik dalam bentuk penyuluhan lisan, tertulis maupun peragaan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan masyarakat. Bimbingan baik berupa bimbingan siswa dasar, lanjutan maupun keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu.

Pelayanan sosial secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, kesehatan pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, bidang pemerintahan desa dan sebagainya dengan melibatkan berbagai unsur/sector

terkait. Bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, menumbuhkan kreatifitas dan kativitas guna mengelola sumber dan potensi yang ada Pendamping dalam rangka menumbuhkan kemandirian warga dampingan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya agar dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi sosial dan kepercayaan diri mereka agar dapat lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berdiri-sendiri dan melibatkan diri dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat secara merata yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya

Dalam saya melakukan observasi, wawancara dan penelitian yang saya dapatkan sangat banyak pengalaman yang baru bagi saya dan sangat saya butuhkan pengalaman itu dalam saya meneliti didesa kesehatan masyarakat yang baik akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang berkenan dalam melakukan hal itu seperti, mereka mau gerak karena ada uang bukan karena inisiatif mereka sendiri. desa kesehatan selama saya menjabat sebagai bapak datok pengulu desa kesehatan dalam bantuan apa pun itu warga masyarakat desa kesehatan mampu kesmudian masyarakat desa kesehatan sudah lebih maju bisa berkembang sekarang sudah naik status jadi desa maju dapat hadiah dari sudah mau memasuki desa mandiri dengan itu desa mandiri dijuluki desa didalamnya terdapat tim penilainya di luar dari perangkat intinya bekerja pelayanan masyarakat secara administrasi bisa maju sejahtera bisa dibantu perangkat desa kesehatan dalam menjalankan tugas apa pun itu sangat membantu pak datok penghulu dan kalo ada perihal dan di musyawarakan

bersama dalam perangkat desa, keimaman, lembaga MDSK , termasuk juga masyarakat.

Berperan dalam agar desa kita ini sudah maju dan setelah itu naik desa mandiri kegiatan apa pun pada bulan puasa perangkat desa kesehatan bagi-bagi takjil gratis dan itu tidak hanya masyarakat desa kesehatan saja dan dalam pembagian takjil gratis tidak hanya perangkat desa aja yang membagikannya warga desa kesehatan juga ikut serta juga dalam pembagian takjil gratis selama waktu bulan puasa. permasalahan ini kita sebagai masyarakat yang baik dan bijak dalam permasalahan yang terjadi dikampung kita harus lebih teliti lagi dan apalagi tentang keuangan desa dan itu bisa dibuat usaha bagi desa yang sangat dibutuhkan masyarakat menanggapi dalam membantu saudara kita dipalestina seharusnya pemerintah lebih peka lagi terhap musibah terjadi dalam dana tetapi pemerintah tidak peduli dengan semua itu , jalan yang rusak sangat meresahkan warga setempat karena mengganggu perjalanan , kecelakaan yang terjadi didalam suatu masyarakat sebagai kepala desa yang baik ikut membantu mengeluarkan untuk warganya , dalam mengeluarkan dana desa langkah-langkah seperti, pembangunan infrastruktur jalan, SDM, keinginan tentang kemajuan I Kesehatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, penulis melengkapinya dalam penyajian dan pembahsan,

maka penulis menyimpulkan bahwa pelayanan masyarakat yang terjadi di kampung kesehatan yang dimana dikampung kesehatan SDM desa kesehatan sangat baik apalagi pak datok penghulu sangat mengayomi masyarakatnya agar desa kesehatan selalu maju dan berkembang juga desa yang terbaik dan tidak ada yang tidak mentolerensikannya. Hal ini didasarkan pada kategorisasi yang sudah efektivitas:

1. Sudah efektivitas dalam penyaluran dana alokasi desa
 2. Kedisiplinan yang mencerminkan masyarakat yang baik
 3. Solidaritas antara warga masyarakat, dan juga kompak dalam berbagai kegiatan
 4. Sudah adanya transparansi terhadap warga masyarakat
 5. Adanya peraturan desa yang membuat masalah yang bisa diselesaikan dan pemberdayaan masyarakat
- ✓ Penyaluran dana sudah efektif hal ini dapat saya buktikan dari sebutkan kategorisasi seperti yang saya buat ada pun keterangannya :
- sudah efektif dalam penyaluran dana antusias sudah banyak yang terlihat selama saya melakukan penelitian yang dimana memang sudah benar efektif dana alokasi desa (ADD).
 - sudah efektif juga dalam kedisiplinan kerja perangkat desa dalam melakukan kegiatan apa pun perangkat desa maupun perangkat desa sangat disiplin dalam semua
 - sudah efektif solid dalam bermasyarakat tidak mementingkan diri sendiri malahan sangat membantu sesama masyarakat.

-sudah efektif dalam transparansi terhadap masyarakat yang dimana masyarakatnya sangat antusias dalam kegiatan apa pun yang sangat kompak sesama masyarakat banyak juga yang sedang dikerjakan selama program kerja berlangsung.

-sudah efektif dalam peraturan desa seperti kalau ada masalah di desa kesehatan hanya tau didesa kesehatan saja tidak menyebar keluar sana dan dapat juga di musyawarahkan dan dapat mengambil keputusan bersama.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

1. Diharapkan dari desa kesehatan agar lebih peka lagi terhadap sekelilingnya kalo ada pemberitahuan atau informasi harus lebih sigap dan dapat dipahami yang membuat suatu upaya yang baik dalam memajukan desa kesehatan.
2. Diharapkan (SDM) lebih ditingkatkan lagi dan juga lebih solid lagi kekeluargaannya biarpun sudah sangat baik dalam silaturahmi antar sesama warga masyarakat yang mengupayakan masyarakatnya lebih disiplin dan mau mengikuti arahan dari siapa pun itu dan membuat desa kesehatan lebih maju.
3. Diharapkan peran masyarakatnya lebih intens lagi dan membuat kegiatan bersama agar mencapai tujuan yang diinginkan supaya desa kesehatan lebih

maju dan berdiri dengan baik mencerminkan desa yang harus dicontoh dan menjadikan kebanggaan bagi desa kesehatan yang baik.

4. Diharapkan alokasi dana desa (ADD) dana yang masuk agar bisa lebih dikembangkan lagi dan perangkat desa lebih mencerminkan perangkat yang baik dan memuaskan pelayanan bagi masyarakatnya yang membuat kekompakan yang lebih baik lagi kesolitan yang lebih beragam dan juga pemberdayaan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sintia dwi elin, 2015 “ efektivitas pengelolaan desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut prespektif ekonomi islam (studi pada desa semuli rakyat kecamatan abung semuli di kabupaten lampung utara, universitas islam negeri

Hutami sri andi, “ analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

Karimah faizatul, “ pengalokasian alokasi dana desa (ADD) dala upaya meningkatkan pembangunan desa

Rur , novianti , “ analisis penerrapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa

Jurnal

Nurcholis hanif ,” pertrumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa” penerbit, erlangga , tahun 2011 , hal 88-91 Soetomo “ pemberdayaan masyarakat penerbit pustaka pelajar, tahun 2011 ,hal 65

Novar dicky – 40028 . kajian pustaka kerangka pemikiran dan hipotesis

Suwando , ratih nur pratiwi , Chandra kesuma putra. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Baura juliska mandey janthe tulusan femmy. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD)

Wanusa mawatie , choirul saleh, faizatul karimah . penelolan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat .

Web pages

<https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>

<https://www.Materibelajar.id/2015/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaan.html>

<https://dosensosiologi.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-konsep-jenis-dan-tujuan-lengkap>

<https://bppps.kemensos.go.id/bahan-bacaan/file/pemberdayaan.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riska Kesuma Putri
Tempat / Tanggal Lahir : Kualasimpang, 01 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama / Bangsa : Islam/ Indonesia
Alamat : Desa kesehatan Karang Baru Aceh Tamiang
Anak Ke : 1 (pertama) dari 1 (satu) bersaudara
Nama Orang tua
Ayah : Bukhari
Ibu : Yuslina
Alamat Orang Tua : Desa Kesehatan Karang Baru Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri 1 Bukit Tempurung Tahun 2011, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 4 Percontohan Karang Baru Tahun 2014, Berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru Tahun 2017 Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 Sampai Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Riska Kesuma Putri

DRAFT WAWANCARA

**Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan
Kemasyarakatan Di Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang**

Nama : Syaiful Alam

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Datok Penghulu

a. Adanya transparansi dalam desa kesehatan

6. Bagaimana upaya untuk mencapai sasaran yang dirumuskan Apakah masih ada dana bantuan Desa Kesehatan selain dana Desa yang dialokasikan?

Jawab: upaya yang dijalankan oleh pak datok penghulu sangat mengupayakan masyarakatnya agar lebih lagi dan juga menjaga silaturahmi sesama masyarakat.

7. Usaha apa sajakah yang kepala Desa lakukan untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) Masyarakat Desa Kesehatan Karang Baru Aceh Tamiang?

Jawab: usaha yang dilakukan oleh pak datok penghulu sangat banyak dan sangat meningkatkan lebih baik agar menerapkan pemimpin yang baik.

8. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?

Jawab: peran pemerintah dalam membina masyarakatnya lebih baik agar memajukan desa kesehatan yang membuat apa pun itu yang baik.

9. Bagaimana peran pemerintah dalam mendisiplinkan menerapkan peraturan Desa kepada masyarakat Desa Kesehatan?

Jawab: disiplin yang dilakukan menerapkan peraturan desa yang mencerminkan desa yang baik dan juga menjadikan kedisiplinan bagi desa itu juga agar mendahulukan yang baiknya.

DRAFT WAWANCARA

Nama : Afriani

Umur : 44 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

a. Adanya kurang kesolitan anatar sesama masyarakat

1. Menurut ibu datok yang sekarang ini baik atau tidak kalau tidak baik apa dan sebaliknya?

Jawab: menurut saya datok yang sekarang ini sangat mencerminkan datok yang baik dan bijaksana dalam urusan apa pun cepat ditanggapi

2. Apakah datok yang sekarang mengecewakan masyarakat desa kesehatan dan kalau tidak mengecewakan desa kesehatan apa alasannya?

Jawab: datok yang sekarang ini tidak ada masyarakat yang mengecewakan ataupun membuat masyarakat menunggu untuk kegiatan apa pun itu contohnya , pengutipan sampah gratis yang mejadi tolak ukur yang baik.

3. Bagaimana menurut ibu perangkat desa yang sekarang ini sudah cukup lebih baik atau tidak apa alasannya?

Jawab: menurut saya peran perangkat desa sangat membantu masyarakat desa kesehatan agar lebih baik lagi dan mengurus apa pun itu tidak memminta uang malahan gratis dan kerja mereka sangat cepat dan tepat.

DRAFT WAWANCARA

Nama : Ajiba

Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 71 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

a. Adanya keperdulian didalam suatu masyarakat

1. Menurut ibu sebagai masyarakat desa kesehatan pak datok yang sekarang dan yang dulu apa perbedaannya?

Jawab: menurut saya datok yang sekarang sangat baik dan membawa perubahan yang banyak juga bagi desa kesehatan, kalo datok yang dulu sangat kurang karena dalam meminta tanda tangan saja sangat lama direspon dan lama juga ditanggapi datok yang sekarang 100% dan yang dulu 40%

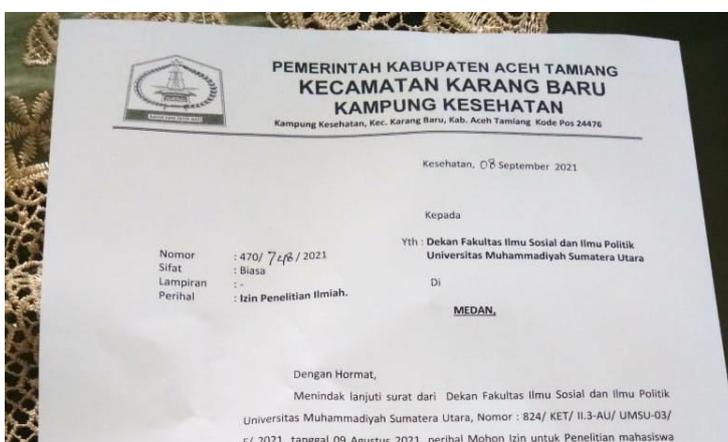
2. Apakah datok yang sekarang ini sudah membawa perubahan bagi desa kesehatan contohnya?

Jawab: selama pak datok yang sekarang banyak membawa perubahan contohnya, pengutipan sampah gratis, setiap kegiatan berjalan dengan tepat waktu, pembangunan MCK dan yang lain

3. Apakah ibu dan masyarakat desa kesehatan ikut adil dalam kegiatan apa pun?

Jawab: masyarakat desa kesehatan sangat antusias yang besar dalam kegiatan apa pun yang dibuat oleh pak datok penghulu desa kesehatan

Surat penelitian dan surat balasan penelitian









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 23 Februari 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Riska Kesuma Putri
N P M : 1703100071
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 1310. sks, IP Kumulatif 3,20

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Penyaluran dana di desa tampung terhadap Pembinaan Keresjahteraan di desa kesehatan kab. Aceh Tamiang Kabupaten	
2	Faktor penyebab menurunnya alokasi dana dalam proses pembinaan di tampung Sutejadi kab. Aceh Tamiang	
3	Peran masyarakat dalam mendukung terlaksananya alokasi dana pembangunan kab. Aceh Tamiang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 23 Februari 2021.

Pemohon,

(Riska Kesuma Putri)

Ketua,

(.....)

Pembimbing Dekan Kusizal

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Etika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 246/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **23 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RISKA KESUMA PUTRI**
 N P M : 1703100031
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP
 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Pembimbing : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 054.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 11 Rajab 1442 H
 23 Pebruari 2021 M



Dekan

Dr. ARIETI SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Esai menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

Nomor : 824/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 30 Dzulhijjah 1442 H
09 Agustus 2021 M

Kepada Yth : Kepala Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

- Nama mahasiswa : **RISKA KESUMA PUTRI**
- N P M : 1703100031
- Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
- Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
- Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG DALAM RANGKA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Umsu merupakan surat elektronik
nomor dan file galery

Nomor : 824/KI/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : 1
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 30 Dzulhijjah 1442 H
09 Agustus 2021 M

Kepada Yth : Kepala Desa Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
di-

Tempat,

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **RISKA KESUMA PUTRI**
N P M : 1703100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG DALAM RANGKA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr, wb.


Dehan
Dr. Anwar Saleh, S.Sos.,MSP.



Cc : File



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Exl. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Hal ini merupakan surat yang dipublikasikan
nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 4-03-2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RISKA KESUMA PUTRI
N P M : 1703100031
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 216.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 23 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP
PEMBINAAN KEPASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

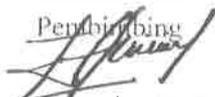
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing


(OEDI AMIZAL, S. Sos., M.Si.)

Pemohon,


(RISKA KESUMA PUTRI)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 509/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EMIL NURSAFITRI	1703100087	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
2	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
3	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	SISILIA NABILA	1703100033	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PROGRAM REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE (3R) DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN

Medan, 26 Sya'ban 1442 H

08 April 2021 M


Dekan
Dr. Anfin Saldi, S.Sos.,MSP.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RISKA KESUMA PUTRI
N P M : 1703100031
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Dana Kampung Dalam Rangka Pembinaan Kemasayarakatan Di Desa Kesehatan Kecamatan Karang Bara Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	19/05/2020 23/02/2021	- Peneriksaan judul Proposal " Efektivitas Penyaluran di desa dana dalam rangka kampung terhadap pembinaan kemasayarakatan di desa kesehatan kabupaten Aceh tamiang - but noil	
2.	23/02/2021	- Penetapan judul Proposal dan secepatnya selesaikan segera proposalnya.	
3.	25/02/2021	- Pergantian judul Proposal saya oleh pembimbing saya pat dedi amri zal = Efektivitas Penyaluran dana kampung kecamatan Pembinaan Kemasayarakatan di kampung kesehatan kab. aceh tamiang)	
4.	28/02/2021	- Bimbingan Proposal 1 Efektivitas penyaluran dana kampung terhadap pembinaan kemasayarakatan di kampung kesehatan kab. aceh tamiang).	
5.	15/03/2021	- Acc Proposal	
6.	11/07/2021	- Bimbingan pertama Skripsi BAB 1 sampai BAB 3 lebih di lanjutkan lagi ditambahkan abstrak, Daftar Rujukan juga. (online)	
7.	5/08/2021	- Acc Buat Penelitian di desa kesehatan kab. Aceh Tamiang)	
8.	2/-09/2021	- Bimbingan Bab 4 sampai BAB 5	
	12/-08/2021	- Revisi surat Balasan fureritiran	
		- Revisi surat Balasan penelitian	
9.	13/08/2021	- Acc SKRIPSI ujian meja hijau	

Medan, 13 September2021..

Dekan

(Dr. ARIFIN Saleh, MSP.

Ketua Jurusan,

(.....)

Pembimbing,

(Dedi Amri zal, S. Sps, M. Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terperca

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1031/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	M. ARIANDI PUTRA	1703100010	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	KOORDINASI PIMPINAN BIDANG DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MEDAN
7	RISKA KESUMA PUTRI	1703100031	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA KAMPUNG TERHADAP PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
8	DEBBY WINDA ANELDA	1703100006	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KOTA MEDAN
9	FAZALIQA SHALSABILLA	1603100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN
10	DINDA ASMARADHANA AMA	1703100055	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2020 DALAM PENATALAKSANAAN PERPINDAHAN PNS ANTAR UNIT KERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 15 Safar 1443 H

22 September 2021 M

Ditetapkan oleh :

Rektor
Wakil-Rektor


Prof. Dr. M. HANAFI ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom